

I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan modernisasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan faktor pendukung utama terbentuknya manusia yang produktif dan kreatif guna terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur serta memajukan bangsa dan negara. Dalam arti luasnya, pendidikan mengandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih setiap individu.

Dalam UUD 1945 alenia ke-4 dijelaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maksud dalam hal ini adalah melalui bidang pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara (*citizen's right*) pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen

Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.” Hak-hak dasar itu adalah akibat logis dari dasar negara Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pasal 31 ayat (1) diatas segera diikuti oleh pasal 31 ayat (2) yang menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Selanjutnya Pasal 31 ayat (3) menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengenyam pendidikan yang baik, pemerintah pun selalu membuat program-program yang membantu masyarakat dalam menunjang pendidikan agar masyarakat indonesia dapat mengerti bahwa pendidikan itu sangatlah penting dan dapat membantu untuk meraih prestasi.

Sebagaimana diuraikan pada bagian lain, pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat.

UUD 1945 menegaskan hanya ada satu sistim pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu sistim pendidikan nasional diperlukan agar bangsa Indonesia yang amat

majemuk itu dapat terus mengembangkan persatuan kebangsaan yang menghormati kemajemukan dan kesetaraan sesuai dengan sasanti “bhinneka tunggal ika.”

Berbagai muatan lokal dalam sistim pendidikan nasional di daerah-daerah dapat diadakan sepanjang merupakan imbuhan dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila yang menghormati kemajemukan, kesetaraan dan persatuan.

Dalam semangat UUD 1945 pendidikan diarahkan bagi rakyat keseluruhan dengan perhatian utama pada rakyat yang tidak mampu agar setiap warga dapat mengembangkan dirinya sebaik-baiknya yang pada gilirannya merupakan pilar bagi perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Jika ketentuan UUD 1945 itu dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang dan bagi warganegara Indonesia mengikuti pendidikan dasar adalah kewajiban. Menghalangi dan atau melarang anak Indonesia bersekolah adalah perbuatan melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya.

Sejalan dengan itu UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk membiayai kegiatan pendidikan, yaitu sedikit-dikitnya 20% dari APBN dan dari masing-masing APBD propinsi dan kabupaten kota (Pasal 31 ayat (4) UUD 1945).

(<http://www.leimena.org/id/page/v/750/kenali-hak-dan-tanggung-jawab-anda-hak-untuk-mendapat-pendidikan-4>)

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sejak orde baru telah mengadakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh Rakyat Indonesia. (<http://kemendikbud/pendidikan.dasar.2000.co.id>)

Penyelenggaraan pendidikan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan perguruan tinggi dengan proses pengajaran yang berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dan tanpa proses pengajaran yang berjenjang dan berkesinambungan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang berada di luar pendidikan formal. Dalam keluarga diselenggarakan pendidikan keluarga dengan memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan mengenai agama, moral, etika, budaya, dan keterampilan. Sehingga keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pendidikan. Dengan demikian, latar belakang keluarga harus diperhatikan guna tercapainya pendidikan yang maksimal.

Orang tua, masyarakat, dan pemerintah adalah tiga unsur yang bertanggungjawab dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Masyarakat dan pemerintah bertugas menyiapkan sarana dan prasarana diselenggarakannya proses pendidikan, seperti sekolah, guru, pegawai yang mengurus administrasi sekolah.

Bahar dalam Maftukhah (2007:20), menyatakan bahwa pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas lebih banyak mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang baik dari

orang tua mereka. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah, kurang mendapat bimbingan dan pengarahan yang cukup dari orang tua mereka, karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keluarga mempunyai pengaruh terhadap proses perkembangan anak karena keluarga adalah lembaga sosial pertama dalam hidup manusia. Dalam keluarga, orang tua memiliki tugas dan kewajiban dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anak, terutama dalam hal finansial. Dikatakan bahwa orang tua yang berstatus sosial ekonomi tinggi, tidaklah banyak mengalami kesulitan dalam proses pendidikan anaknya. Sebaliknya, bagi orang tua yang berstatus sosial dan ekonomi rendah sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Dalam proses pembelajaran diperlukan sarana penunjang yang terkadang mahal. Akibatnya bagi orang tua yang tidak mampu memenuhi sarana penunjang tersebut, maka anak akan terhambat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber daya manusia menjadi rendah sehingga menghambat kemajuan bangsa dan negara.

Di Indonesia sangat banyak program-program yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan. Program-program tersebut diantaranya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, Program Pemberantasan Buta Huruf Nasional, Program Bina lingkungan. Program bantuan pemerintah tersebut langsung diarahkan kepada siswa dan siswi miskin diseluruh Indonesia. Namun, walaupun program ini sudah gencar dilaksanakan oleh pemerintah masih saja tidak tepat sasaran. Salah satu contoh kasus yang sampai sekarang belum sama sekali merasakan program pemerintah terdapat didaerah Papua dan sekitarnya. Daerah yang sulit dijangkau dan akses transportasi yang bahkan sangat minim membuat bantuan dari pemerintah sering terhambat, oleh karena itu bantuan yang diberikan oleh pemerintahan tidak ada yang

memenuhi target untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud dalam membenahi dan memperhatikan bantuan untuk daerah yang terpencil.

Tingginya biaya pendidikan dan kurang sarana dan prasarana untuk mengenyam pendidikan membuat para orangtua yang memang notabene keluarga miskin tidak dapat menyekolahkan para putra-putrinya. Dalam hal ini seharusnya program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dapat membantu dan meringankan siswa-siswi miskin di daerah tersebut untuk mengenyam pendidikan.

Di Provinsi Lampung Program Pemerintah seperti dana BOS dan Program Bina Lingkungan sudah beberapa tahun terakhir terlaksana dengan baik. Dari tingkat SD sampai tingkat Universitas sudah merasakan program ini. Penerimaan calon peserta didik baru melalui program Bina Lingkungan (Biling), di Kota Bandarlampung terus dilanjutkan pada Tahun Pelajaran 2014/2015.

Program Bina Lingkungan yaitu memberikan porsi 50 persen masuk ke sekolah negeri tanpa seleksi dan gratis untuk memberikan kesempatan belajar bagi calon siswa dari keluarga secara ekonomi kurang mampu. Pemerintah Kota Bandarlampung sejak Tahun Pelajaran (TP) 2013/2014 menerapkan program Bina Lingkungan kepada sekolah-sekolah negeri, guna memberikan kesempatan belajar di sekolah-sekolah negeri tanpa tes bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lingkungan sekolah negeri setempat.

Kebijakan pemerintah kota yang dipimpin oleh Wali Kota Bandarlampung Herman HN itu sudah berjalan satu tahun, dan akan dilanjutkan pada tahun pelajaran berikutnya, namun

pelaksanaannya akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar benar-benar tepat sasaran. Untuk mencapai dan mempertahankan prestasi yang baik itu tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dana dari pemerintah, melainkan harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, Komite Sekolah, dan para orang tua/wali murid.

'Banyaknya prestasi yang diraih yang ditunjukkan dengan banyaknya hadiah piala, piagam, medali dan lainnya itu perlu terus ditingkatkan, karena itu perlu kerja sama yang lebih baik antara sekolah dan orangtua murid di masa yang akan datang.

(<http://www.ciputranews.com/kesra/program-pendidikan-bina-lingkungan-di-bandarlampung-dilanjutkan>)

Keadaan demikian dapat kita lihat di SMP Negeri 22 Bandar Lampung terdapat siswa-siswi dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi orang tua yang berbeda. Adanya perbedaan status sosial ekonomi orang tua para siswa-siswi tersebut mempunyai pengaruh terhadap proses pembelajaran terutama dalam membiayai seluruh keperluan pembelajaran. Dalam hal ini sebagian siswa-siswi SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang masuk dalam Program Bina Lingkungan dapat terbantu dalam hal pembelajaran karena Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan dana untuk berbagai sarana dan prasarana pendidikan seperti Seragam Sekolah, Buku, dan Biaya angsuran sekolah sampai siswa-siswi ini lulus tidak akan dipungut biaya apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana besarnya Pengaruh program bina lingkungan terhadap prestasi siswa dan siswi kurang mampu di SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

B.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pengaruh Program Bina Lingkungan terhadap prestasi siswa-siswi di SMP Negeri 22 bandar Lampung ?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini menganalisa Pengaruh Program Bina Lingkungan terhadap prestasi siswa-siswi di SMP Negeri 22 bandar Lampung ?

D.Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi dan pengaruh Program Bina Lingkungan yang dijalankan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap siswa-siswi yang kurang mampu.
- b. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dan sebagai data dasar bagi perkembangan sistem pendidikan guna terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.